

Implementation Of Information Technology And Regional Financial Management To Improve The Quality Of Regional Financial Reports Of Karawang Regency

Implementasi Teknologi Informasi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Via Selfiana¹, Sihabudin², Robby Fauji³

Universitas Buana Perjuangan Karawang^{1,2,3}

mn20.viaselfiana@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, sihabudin@ubpkarawang.ac.id²,

robby.fauji@ubpkarawang.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of information technology and regional financial management in improving the quality of financial statements in Karawang Regency. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of information technology through SIPD (Regional Government Information System) has supported a more structured and efficient process from planning to financial reporting. However, challenges remain, such as limited human resource competence at the sub-district level and network disruptions during peak hours. Regional financial management has been carried out systematically through planning, execution, administration, and accountability cycles. The four dimensions of financial report quality is relevance, reliability, comparability, and understandability, have been well fulfilled, supported by an integrated system and a culture of accountability. The study concludes that effective use of information technology and sound financial management significantly contribute to the improvement of financial report quality. The implication is the need for strengthening human resources capacity, improving infrastructure, and optimizing the financial information systems used by regional governments.

Keywords: Information Technology, Regional Financial Management, Quality Financial Reporting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) telah membantu proses perencanaan hingga pelaporan keuangan secara lebih terstruktur dan efisien. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan kompetensi SDM di wilayah kecamatan dan gangguan jaringan pada jam sibuk. Pengelolaan keuangan daerah juga telah dilaksanakan secara sistematis melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Keempat dimensi kualitas laporan keuangan yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman, telah terpenuhi dengan cukup baik, didukung oleh sistem yang terintegrasi dan budaya kerja yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi dan pengelolaan keuangan yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Teknologi informasi, pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan berkualitas.

1. Pendahuluan

Dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis akuntabilitas. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mampu mengelola anggaran secara efisien, tetapi juga menyusun laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah pusat. Dalam hal laporan keuangan, pemerintah harus mampu memberikan laporan yang memuat data keuangan yang berkualitas (Bahiu et al., 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi empat kriteria: relevan, akurat, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk menerbitkan laporan keuangan berkualitas tinggi (Husna et al., 2022). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk media yang digunakan pemerintah daerah untuk menunjukkan tanggung jawab fiskalnya kepada masyarakat adalah laporan keuangan tahunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), yang disahkan pada setiap akhir tahun anggaran (Sinulingga, 2022).

Laporan keuangan pemerintah yang disetujui oleh masing-masing organisasi infrastruktur daerah digunakan untuk menyetujui laporan keuangan pemerintah (Zubaidi et al., 2019). Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah integritas dan manajemen, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan strategis dan intelijen operasional, kesehatan organisasi, hubungan masyarakat, dan bukti faktual dan grafis (Hasanah et al., 2022).

Setiap tahunnya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan evaluasi dalam bentuk opini (Novitasari, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwasannya ada empat jenis opini yang diberikan BPK RI terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

BPK memberikan opini atas laporan keuangan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022, Kabupaten Karawang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporannya dianggap andal. Namun demikian, masih terdapat catatan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus terus dilakukan secara sistematis.

Penggunaan Teknologi Informasi Merupakan Faktor yang Berpotensi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Di sisi lain, Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 memberikan landasan normatif dalam menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Selain menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah daerah harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengaruh teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya akan tergambar dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Akhmad et al., 2018).

Sedangkan dengan SAP, prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan guna memberikan laporan keuangan yang berkualitas (Sinulingga, 2022). Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dikatakan sebagai persyaratan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Kusnadi et al., 2022). Menurut (Hadis, 2022), sistem akuntansi keuangan daerah berguna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Laporan

keuangan akan meningkat kualitas dan kejelasannya jika standar-standar tersebut di atas diterapkan pada saat penyusunannya (Fazlurahman et al., 2021).

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk mewujudkan laporan keuangan berkualitas adalah dengan menerapkan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan sistem informasi ini diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Pasal 391 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan penggunaan SIPD oleh seluruh pemerintah daerah. Studi oleh (Zubaidi et al. 2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kabupaten Karawang, kendala utama berasal dari terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, serta belum optimalnya fitur pelaporan dalam SIPD RI. Hal ini selaras dengan temuan (Hadis, 2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan teknologi informasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan kesiapan infrastruktur.

Meski demikian, penggunaan aplikasi pendamping terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal penyusunan laporan secara cepat dan tepat waktu. (Hanifah, 2023) menyatakan bahwa teknologi informasi yang terintegrasi membantu dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Selain faktor teknologi, pengelolaan keuangan daerah juga berperan penting dalam menentukan kualitas laporan. Menurut (Husna dan Ikhbar, 2022), pengelolaan keuangan daerah yang efektif mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan sesuai regulasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara deskriptif bagaimana implementasi teknologi informasi dan proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi yang tepat untuk optimalisasi sistem informasi keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendefinisikan implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang, termasuk sistem yang digunakan dan kendala yang dihadapi.
2. Menggambarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
3. Menilai sejauh mana teknologi informasi mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
4. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

KAJIAN TEORI

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Irfani (2020) manajemen keuangan ialah tata kelola keuangan yang melibatkan kegiatan terkait dengan pencairan dan penggunaan dana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Mengacu pada teori tersebut, bisa dipahami bahwasanya manajemen keuangan mencakup pengelolaan keuangan perusahaan dengan fokus pada pencairan dan penggunaan dana secara efisien dan efektif.

b. Teori Implementasi Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi (TI) merujuk pada proses penerapan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem dan prosedur berbasis digital ke dalam kegiatan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas informasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Penerapan TI yang berhasil akan menciptakan integrasi data dan proses yang lebih efektif.

Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terciptanya sistem informasi keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Menurut Mulyani, (2016), sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi mampu meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pemrosesan data keuangan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih andal dan informatif.

Davis, (2021) dalam bukunya "Information Systems: A Manager's Guide" menekankan bahwa implementasi teknologi informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan perubahan struktural, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa dukungan dari seluruh unsur organisasi, adopsi sistem berbasis TI seringkali menghadapi resistensi dan kegagalan dalam tahap implementasi.

Sementara itu, Kardina et al. (2024) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara strategis mampu meningkatkan kinerja organisasi. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa faktor seperti keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis masih menjadi kendala utama dalam tahap implementasi.

Dengan demikian, implementasi teknologi informasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan organisasi, manajemen perubahan, dan keterlibatan aktif dari pengguna teknologi.

c. Teori Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Teori pengelolaan keuangan mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen kas, investasi, penganggaran modal, dan struktur modal. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2017), tujuan utama pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan mengambil keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya keuangan.

Manajemen kas adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan yang berfokus pada pengelolaan arus kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas perusahaan. Menurut penelitian oleh Ross et al. (2019), manajemen kas yang efektif membantu perusahaan menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional sehari-hari dan mengoptimalkan penggunaan dana.

Penganggaran modal adalah proses evaluasi dan pemilihan proyek investasi yang diharapkan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Menurut Brealey et al. (2019), metode penganggaran modal seperti Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk menilai kelayakan proyek investasi berdasarkan nilai waktu uang dan risiko yang terkait.

Struktur modal mengacu pada kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk mendanai operasi perusahaan. (Kusnadi et al., 2022) mengemukakan teori struktur modal yang menyatakan bahwa dalam pasar yang sempurna tanpa pajak, biaya kebangkrutan, dan biaya agensi, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Namun, dalam praktiknya, perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari utang dan ekuitas untuk menentukan struktur modal yang optimal.

Pengelolaan keuangan yang baik juga melibatkan pengendalian keuangan untuk memastikan bahwa tujuan keuangan perusahaan tercapai. Menurut (Bahiu et al., 2021), sistem pengendalian keuangan yang efektif mencakup berbagai alat dan teknik seperti analisis varians, anggaran fleksibel, dan balanced scorecard untuk memantau kinerja keuangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Secara keseluruhan, teori pengelolaan keuangan memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang rasional dan berbasis data dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Penerapan teori ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

d. Teori Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah tingkat keandalan dan relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Teori kualitas laporan keuangan mencakup berbagai konsep seperti relevansi, keandalan, komparabilitas, dan dapat dipahami. Menurut Deegan (2014), laporan keuangan berkualitas tinggi harus memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan bebas dari bias untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat.

Relevansi adalah aspek utama dari kualitas laporan keuangan yang mengacu pada sejauh mana informasi dalam laporan keuangan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori. Menurut Kieso et al. (2020), informasi prediktif membantu pengguna dalam memprediksi hasil masa depan, sedangkan informasi konfirmatori membantu pengguna dalam menilai kinerja masa lalu.

Keandalan adalah kualitas yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya. Menurut (Novitasari, 2020), untuk mencapai keandalan, laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang diakui umum, serta harus dapat diverifikasi dan netral.

Dapat dipahami adalah kualitas yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis dan ekonomi. Menurut (Suryono, 2021), penyajian informasi yang jelas dan ringkas dapat meningkatkan keterbacaan dan pemahaman laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penting bagi perusahaan untuk menerapkan standar akuntansi yang diakui secara internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Menurut (Hadis, 2022), adopsi IFRS dapat meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan investor.

Secara keseluruhan, kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perusahaan harus berkomitmen untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, serta memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan dengan cara yang relevan, andal, komparatif, dan dapat dipahami.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keterkaitan antara implementasi teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kerangka berpikir ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami kontribusi masing-masing variabel terhadap pencapaian kualitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terciptanya sistem informasi keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Menurut

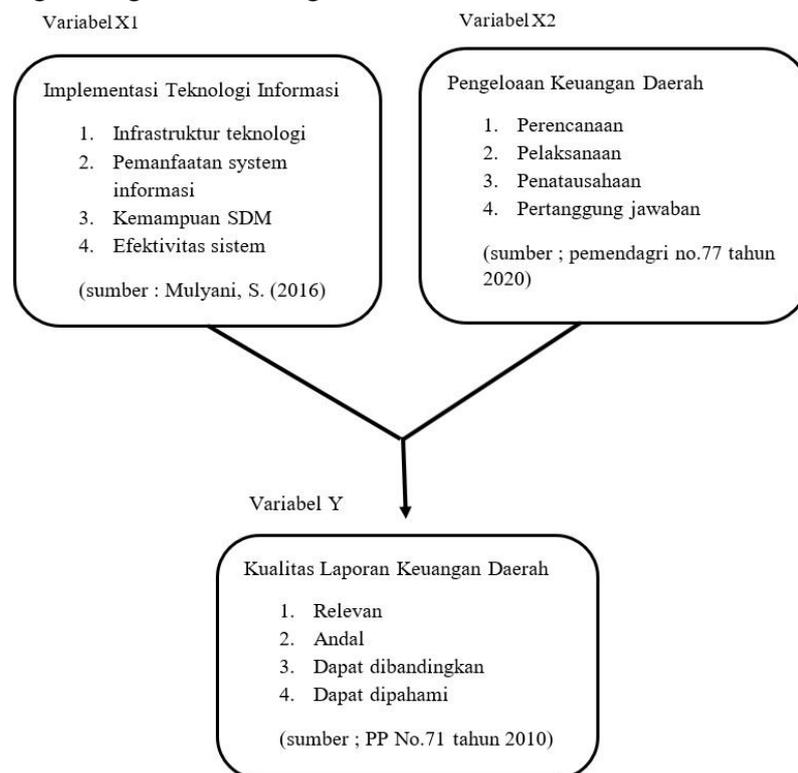
Mulyani (2016), sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi mampu meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pemrosesan data keuangan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih andal dan informatif.

Selain itu, **pengelolaan keuangan daerah** yang baik, yang mencakup aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan, menjadi faktor penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua faktor tersebut diperkirakan memberikan kontribusi terhadap **kualitas laporan keuangan daerah**, yang dalam hal ini dinilai dari empat karakteristik utama menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (SAP, 2020).

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berperan dalam mendorong terciptanya laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Paradigma penelitian berdasarkan rantai pemikiran di atas dapat digambarkan dari indikator masing-masing variabel sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Mulyani, S. (2016) , pemendagri no.77 tahun 2020) , PP No.71 tahun 2010)

Di olah Oleh Penulis

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif , yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan temuan dari proses wawancara, dokumentasi, dan observasi tanpa pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019:147).

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, karena instansi ini merupakan pelaksana utama dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- a) Wawancara mendalam, dilakukan terhadap tiga kategori narasumber dari BPKAD Karawang, yaitu Kepala Bagian Keuangan, kepala perangkat daerah, dan pegawai/staff akuntan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sesuai dimensi dan indikator setiap variabel.
- b) Observasi, digunakan untuk mengamati langsung penggunaan sistem informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
- c) Dokumentasi, berupa laporan keuangan, struktur organisasi, sistem aplikasi yang digunakan, serta foto-foto kegiatan wawancara dan tampilan sistem.

1. Sumber Data

- Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.
- Data sekunder berasal dari literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan regulasi yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan utama:

1. Pengumpulan data: memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data: memilah, merangkum, dan memilih data penting yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data: menampilkan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyusun interpretasi akhir berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Karawang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama: Kepala Bidang Keuangan, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf Akuntan BPKAD Kabupaten Karawang.

Implementasi Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini digunakan untuk seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa **infrastruktur teknologi** di kantor pusat BPKAD sudah memadai, dengan ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, dan akses sistem bagi seluruh staf. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti keterlambatan akses jaringan saat jam sibuk dan kesenjangan fasilitas di tingkat kecamatan. Kepala Perangkat Daerah menekankan bahwa “di pusat cukup baik, tetapi masih perlu penguatan di OPD kecamatan agar akses tidak terganggu.”

Dalam hal pemanfaatan sistem informasi, SIPD telah dimanfaatkan secara aktif oleh seluruh OPD. Kepala Bidang Keuangan menjelaskan bahwa “SIPD digunakan di seluruh proses keuangan daerah. Ini mempermudah integrasi antar unit dan tahap perencanaan hingga pelaporan.” Namun, karena fitur SIPD masih terbatas, beberapa unit kerja tetap menggunakan aplikasi pendamping untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tertentu.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), sebagian besar staf telah mengikuti pelatihan dan mampu mengoperasikan sistem, meskipun masih ada pegawai terutama di wilayah kecamatan yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh staf akuntan: “Saya terbantu dengan pelatihan sebelumnya, tapi ada juga teman-teman lain yang belum terbiasa dan perlu belajar lebih lanjut.”

Secara umum, efektivitas sistem SIPD dinilai cukup baik. Semua narasumber sepakat bahwa penggunaan SIPD mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan manual, dan memudahkan proses pelaporan. Sistem ini juga memungkinkan pencatatan otomatis, akses real-time, dan audit trail untuk setiap transaksi.

Tampilan Awal SIPD

Untuk memberikan gambaran visual, berikut adalah tampilan awal sistem SIPD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang:



Gambar 2. Tampilan awal SIPD
(Sumber ; wawancara di BPKAD Karawang,2025)

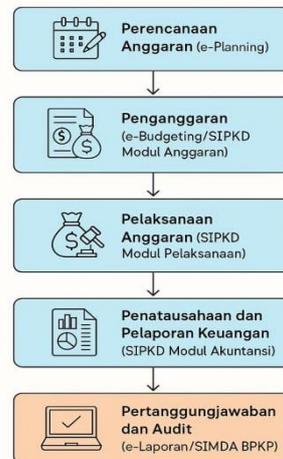
Alur Proses Implementasi SIPD

Proses implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi melalui tahapan berikut:

1. Perencanaan Anggaran
Perangkat Daerah menyusun Renja dan menginputnya ke dalam SIPD melalui modul RKPd.
2. Penyusunan dan Pengesahan Anggaran
Rencana kegiatan ditarik ke dalam modul anggaran dan disusun menjadi RKA dan APBD yang disahkan DPRD.
3. Pelaksanaan Anggaran
OPD menjalankan kegiatan berdasarkan DPA. Pencairan dana dilakukan secara elektronik melalui SIPD.
4. Penatausahaan dan Akuntansi
Semua transaksi dicatat otomatis dalam modul akuntansi SIPD.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang ditarik dari sistem dan diverifikasi untuk audit oleh BPK.

Berikut adalah diagram alur proses implementasi teknologi informasi tersebut:



Gambar 3. Alur/ proses Implementasi teknologi informasi di BPKAD Karawang

(Sumber ; wawancara di BPKAD Karawang, 2025)

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan dilakukan secara terstruktur dan sesuai siklus anggaran. Perencanaan dimulai dari Musrenbang hingga penyusunan Renja OPD yang diinput ke dalam SIPD. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan: "Setiap perencanaan harus sesuai dengan RPJMD dan kebutuhan daerah. SIPD membantu konsolidasi data lintas OPD."

Pelaksanaan anggaran umumnya berjalan sesuai rencana, tetapi beberapa kendala ditemukan. Staf akuntan menyampaikan: "Kadang kami harus menunggu OPD melengkapi dokumen, baru bisa lanjut proses realisasi." Proses penatausahaan keuangan dilakukan sepenuhnya secara digital, dan laporan pertanggungjawaban keuangan ditarik dari data realisasi yang telah diverifikasi.

Sistem SIPD sangat membantu dalam proses pencatatan transaksi dan pengawasan keuangan, karena seluruh bukti transaksi dapat diunggah secara langsung dan dilacak secara real-time. Kepala Perangkat Daerah mengatakan: "Sistem otomatis mencatat dan mengelompokkan transaksi, jadi penelusuran dan pelaporan menjadi lebih mudah."

2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan di Kabupaten Karawang dinilai cukup baik berdasarkan empat kriteria utama: relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman.

- Relevansi: Kepala Bidang Keuangan menyatakan: "Laporan kami disusun berdasarkan kebutuhan pimpinan, DPRD, dan auditor, agar setiap informasi bisa langsung digunakan untuk pengambilan kebijakan."
- Keandalan: Semua data yang masuk ke dalam SIPD telah melalui proses verifikasi berlapis. Staf akuntan menambahkan: "Data yang saya input harus sesuai dokumen. Setelah masuk, sistem tidak bisa diubah sembarangan."
- Keterbandingan: Format laporan dibuat tetap setiap tahunnya agar mudah dibandingkan antar periode. Kepala Perangkat Daerah menyebutkan bahwa "SAP menjadi acuan agar laporan bisa dievaluasi secara berkala dan lintas unit."
- Keterpahaman: Laporan keuangan disusun dengan bahasa yang jelas dan ringkas. Narasumber menyatakan bahwa mereka menghindari istilah teknis dan menambahkan grafik serta tabel agar laporan mudah dipahami.

3. Faktor Pendukung dan Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan, kepala perangkat daerah, dan staff akuntan, serta hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa keberhasilan maupun tantangan dalam implementasi teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat.

A. Beberapa faktor pendukung yang ditemukan antara lain:

- Ketersediaan infrastruktur TI di pusat
- Dukungan pimpinan daerah terhadap sistem digital
- Pelatihan teknis kepada pegawai
- Sistem SIPD yang terintegrasi dan real-time

B. Faktor penghambat meliputi:

- Keterbatasan kompetensi SDM
- Kendala teknis jaringan dan akses system
- Ketergantungan pada aplikasi pendamping
- Kendala administrative dan perubahan kebijakan mendadak

Pembahasan

1. Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah dilakukan secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karawang. Sistem ini digunakan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pertama telah tercapai, yaitu mendeskripsikan sistem dan implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Infrastruktur teknologi di tingkat kabupaten dinilai cukup baik, dengan ketersediaan perangkat keras dan jaringan internet. Namun, kendala teknis masih ditemukan di wilayah kecamatan, terutama terkait gangguan jaringan saat jam sibuk dan keterbatasan perangkat. Masalah ini menjadi hambatan dalam pemrosesan data secara real-time, dan menunjukkan adanya kesenjangan digital antar wilayah administratif.

Kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD juga menjadi perhatian. Meski pelatihan telah dilakukan, belum semua staf dapat menggunakan sistem secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, melainkan juga kesiapan pengguna sebagai elemen penting dalam perubahan teknologi. Sejalan dengan Davis (2021), kesiapan SDM, budaya organisasi, dan struktur kerja sangat mempengaruhi keberhasilan adopsi sistem informasi.

Efektivitas SIPD terbukti melalui percepatan penyusunan laporan, pengurangan kesalahan input manual, dan kemudahan pelacakan transaksi. Dengan integrasi data antar perangkat daerah, sistem mempermudah verifikasi dan konsolidasi data untuk pelaporan yang akurat.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah: Proses dan Praktik Lapangan

Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang, dengan hasil yang langsung diinput ke dalam SIPD. Proses ini mendukung keterbukaan informasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran merespons kebutuhan riil masyarakat. Pada tahap penganggaran, SIPD dimanfaatkan untuk menyusun dan mengesahkan APBD, yang selanjutnya menjadi acuan pelaksanaan anggaran.

Namun, **pelaksanaan anggaran** masih dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti keterlambatan pengajuan dokumen dari OPD, revisi kebijakan pusat, dan perubahan harga barang/jasa. Hambatan ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas sistem dan koordinasi antar

unit kerja. Di sinilah peran SIPD menjadi signifikan karena memungkinkan pemantauan proses secara digital dan mendukung transparansi anggaran.

Dalam tahap **penatausahaan dan pelaporan**, penggunaan SIPD sangat memudahkan pencatatan transaksi dan pengarsipan bukti keuangan. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, dan memperkuat akuntabilitas. Sesuai teori Brigham dan Ehrhardt (2017), pengelolaan keuangan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik sangat menentukan pencapaian kinerja organisasi publik.

3. Dampak Implementasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Relevansi laporan tercermin dari kesesuaian isi laporan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti pimpinan daerah, DPRD, dan BPK. Laporan disusun berdasarkan data kegiatan aktual dan target kinerja, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. SIPD memfasilitasi pengelompokan kegiatan berdasarkan program, membuat laporan lebih kontekstual.

Keandalan data keuangan didukung oleh mekanisme verifikasi berlapis dan fitur audit trail dalam sistem. Setiap transaksi tercatat otomatis, sehingga potensi manipulasi dapat diminimalkan. Validasi oleh bendahara, PPTK, dan kepala bidang memastikan laporan yang dihasilkan bebas dari kesalahan material. Hal ini membuktikan bahwa keandalan bukan hanya soal data, tetapi juga pengendalian internal yang kuat.

Keterbandingan laporan dijaga melalui struktur penyajian yang konsisten antar tahun dan antar OPD. Dengan demikian, laporan dapat digunakan untuk menilai efektivitas belanja daerah dari waktu ke waktu. Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) secara konsisten juga memperkuat keterbandingan dan meningkatkan transparansi lintas periode.

Keterpahaman diperoleh melalui penyajian data yang jelas, penggunaan grafik, dan penghindaran istilah teknis yang rumit. Hal ini memudahkan pembacaan oleh pimpinan daerah dan publik yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip komunikasi informasi, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi.

Dari segi teori, hasil ini mendukung pendapat Deegan (2014) dan Kieso et al. (2020) bahwa kualitas laporan tidak hanya soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan keterbukaan terhadap public. Implementasi SAP yang sistematis, seperti yang diterapkan di Karawang, turut memperkuat posisi laporan sebagai alat kontrol dan pengambilan keputusan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pemanfaatan TI

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi informasi juga telah berhasil diidentifikasi, sesuai dengan tujuan keempat penelitian.

A. Faktor pendukung utama adalah:

- Ketersediaan infrastruktur teknologi. Informasi yang memadai
- Dukungan dari pimpinan daerah yang mendorong perubahan berbasis digital.
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM secara berkala.
- Sistem SIPD yang terintegrasi dan mendukung real-time reporting.

B. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Kompetensi SDM

Meskipun pelatihan telah dilakukan, sebagian staf di tingkat kecamatan atau desa masih belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem.

2. Kendala Teknis Jaringan dan Akses Sistem

Gangguan jaringan atau lambatnya akses SIPD saat jam sibuk masih menjadi hambatan.

3. Ketergantungan pada Aplikasi Pendamping

Karena fitur SIPD belum sepenuhnya fleksibel untuk semua jenis laporan dan kebutuhan unit kerja, perangkat daerah masih mengandalkan aplikasi tambahan.

4. Kendala Administratif dan Perubahan Kebijakan Mendadak

Pelaksanaan anggaran seringkali terganggu oleh dokumen pengajuan yang belum lengkap, keterlambatan dari OPD lain, atau revisi anggaran dari pemerintah pusat.

Kendala-kendala tersebut memperkuat teori Davis (2021), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, termasuk kualitas SDM dan dukungan infrastruktur. Sementara itu, Kardina et al. (2024) juga menekankan bahwa hambatan teknis dan rendahnya literasi digital dapat menjadi faktor utama kegagalan dalam digitalisasi layanan publik.

5. Penutup

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi teknologi informasi di Kabupaten Karawang telah dilakukan melalui pemanfaatan SIPD pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem ini membantu mempercepat proses dan meminimalisir kesalahan, meskipun masih ditemukan kendala seperti jaringan lambat dan kesenjangan kompetensi SDM di tingkat kecamatan.
2. Pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara sistematis, mengikuti siklus anggaran daerah sesuai regulasi. Setiap tahap, mulai dari perencanaan melalui Musrenbang hingga pertanggungjawaban, telah didukung sistem informasi dan prosedur validasi yang transparan serta akuntabel.
3. Teknologi informasi berperan signifikan dalam mendukung kualitas laporan keuangan, dengan kontribusi nyata terhadap empat dimensi utama: relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Laporan keuangan disusun berdasarkan data real-time yang terverifikasi dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait.
4. Faktor pendukung dalam pemanfaatan teknologi informasi meliputi ketersediaan infrastruktur, dukungan pimpinan, pelatihan SDM, dan sistem yang terintegrasi. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari keterbatasan kompetensi pegawai di wilayah kecamatan, gangguan jaringan saat jam sibuk, serta ketergantungan pada aplikasi pendamping akibat keterbatasan fitur SIPD.

Implikasi:

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan tindakan perbaikan, antara lain:

1. BPKAD Kabupaten Karawang disarankan untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis secara berkala, terutama bagi staf di kecamatan atau wilayah terpencil. Pendampingan teknis perlu dilakukan hingga seluruh unit kerja mampu mandiri dalam mengoperasikan SIPD.
2. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur jaringan dan perangkat TI di seluruh OPD agar akses terhadap sistem tidak lagi terganggu, khususnya pada periode puncak penginputan data.
3. Pengembang SIPD (Pusat atau Kementerian Dalam Negeri) diharapkan terus melakukan perbaikan fitur pelaporan dan integrasi sistem agar tidak diperlukan lagi aplikasi pendamping, sehingga risiko inkonsistensi data dapat ditekan.
4. Inspektorat dan auditor eksternal (BPK) juga dapat memanfaatkan hasil ini sebagai rujukan untuk menyempurnakan sistem pengawasan berbasis digital serta mendorong budaya kerja yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintahan daerah.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode agar dapat melihat pengaruh antar variabel secara lebih terukur. Selain itu, dapat juga memperluas lokasi penelitian ke daerah lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B. (2022). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)*. 8(2), 68–78.
- Agus S. Irfani, M. B. A. (2020). *MANAJEMEN KEUANGAN DAN BISNIS; Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=qln8DwAAQBAJ>
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Jilid 2. *Sosial Politik dan Ekonomi*. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jimea*, Vol. 5(No. 2), 1855–1869.
- Bahiu, E. L. U., Ivonne S. Saerang, & Untu, V. N. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Terhadap Keuangan UMKM di desa Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1819–1828.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial management: Theory & practice* (15th ed.). Cengage Learning.
- Davis, G. B. (2021). *Information systems: A manager's guide to harnessing technology* (8th ed.). Flatworld.
- Deegan, C. (2014). *Financial accounting theory* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fazlurahman, F., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). *PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada BPKA Kota Bandung)*. 12(2), 250–265.
- Hadis, F. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 17(2), 106–121.
- Hanifah, S. N. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi , Teknologi Informasi , dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 1(2), 182–194.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. September. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Husna, maryam dan ikhbar. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214.
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Kardina, H., Yuliana, S., & Rachman, D. (2024). Digitalisasi layanan publik dan tantangannya di pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi*, 12(1), 45–56.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuangan*

- Pemerintah Daerah Kualitas Laporan*. 1(1), 51–63.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RİYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Mulyani, S. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, D. R. (2020). *INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl . Prof . Soedharto SH Tembalang , Semarang 50239 , Phone + 622476486851 ABST. 9, 1–8.*
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). Fundamentals of corporate finance (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sinulingga, P. S. B. (2022). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo)*. 8, 89–106.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, B. (2021). *PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*. 2.
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 3(2), 68–76.